

Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik

M. Saeri*

Abstract

International relations study has been developed as a science (state of the art) of intense debate. A decade ago it was still possible to divide the field between three main perspectives –Realism, Liberalism and Marxism. Not only have these approaches evolved in new directions, they have been joined by a number of new ‘ism’ vying for attention, including feminism and constructivism. This writings is an introduction to the diverse worldviews that underpin contemporary International Relations (IR) theory. There are two reasons explored in this writing, First, the reasons for such diversity and the second responses to it. The first response, conquest, opposes diversity and seeks to privilege one particular worldview. The second response, coexistence, is one that finds no good reason to privilege a particular worldview, and attributes a positive value to diversity and pluralism.

Keywords: *Perspectives, Realism, Liberalism, Marxism, International Relations.*

Pendahuluan

Ilmu hubungan internasional adalah satu disiplin ilmu yang relatif masih baru. Pertumbuhannya sebagai disiplin ilmu tersendiri dimulai sejak akhir Perang Dunia I (PD I), dan selanjutnya perkembangannya sangat pesat sejak akhir Perang Dunia II (PD II) dengan munculnya kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam pertarungan politik dunia. Kajian hubungan internasional menjadi sangat menarik perhatian masyarakat dunia terutama negara-negara besar ketika itu karena pengalaman mereka sejak sebelum PD II hingga berakhirnya perang tersebut menyisakan beberapa pertanyaan mendasar bagi mereka. Diantara pertanyaan-pertanyaan itu adalah bagaimana mereka menentukan kebijakan kedepan terutama dalam menghadapi pola perimbangan kekuatan dunia? Apa dasar utama bagi mereka menentukan kebijakan terhadap negara-negara lain? Bagaimana menentukan dasar kebijakan tersebut?

* Ketua Laboratorium Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul pemikiran tentang perlunya mengkaji secara sungguh-sungguh tentang berbagai faktor yang dapat digunakan oleh negara sebagai dasar bagi pengambilan kebijakan dalam menghadapi perkembangan dunia yang begitu cepat berubah. Pemerintah Amerika Serikat disinyalir merupakan pihak yang pertama mendorong kajian-kajian hubungan internasional secara lebih mendalam dan khusus terutama untuk keperluan pemerintah Amerika sendiri. Sejak saat itu kajian-kajian hubungan internasional dikaji didalam departemen atau jurusan tersendiri dibawah payung bidang politik atau fakultas ilmu politik. Hal ini berbeda dengan perkembangan sebelumnya, masalah hubungan internasional hanya dikaji dalam bentuk mata kuliah yang terpisah-pisah di berbagai fakultas atau jurusan.

Perkembangan terakhir ini telah menampilkan kajian hubungan internasional secara lebih terpusat dan menyeluruh. Satu hal yang sangat menarik adalah perkembangan kajian hubungan internasional ini diiringi pula dengan perdebatan-perdebatan yang mendasar terhadap dua hal yang berkaitan satu sama lain, yaitu perdebatan tentang apakah ilmu hubungan internasional merupakan disiplin ilmu tersendiri atau tidak, dan kedua perdebatan tentang paradigma yang mendasari perkembangan teori dalam kajian hubungan internasional.

Dalam tulisan ini akan dititikberatkan pada perdebatan kedua yang diharapkan secara langsung atau tidak langsung akan menjawab masalah pada perdebatan pertama. Hal lain yang menarik dalam perdebatan kedua ini adalah munculnya paradigma-paradigma utama dalam kajian hubungan internasional yang satu sama lain saling bertentangan. Paradigma-paradigma utama tersebut antara lain adalah idealisme, realisme, behavioralisme, dan strukturalisme yang muncul sejak tahun 1940-an hingga tahun 1980-an. Pada era 1990-an hingga 2000-an muncul pula paradigma-paradigma baru seperti pluralisme dan feminisme, yang semua itu menambah khazanah kekayaan paradigma dan teori dalam kajian hubungan internasional.

Sekilas Perkembangan Kajian Ilmu Hubungan Internasional

Menurut catatan Steve Smith dalam buku *The Study of International Relations, The State of The Art*¹ bahwa awal perkembangan ilmu hubungan internasional menjadi satu disiplin ilmu tersendiri baru dimulai segera setelah Perang Dunia I (PD I). Sebelum PD I, terutama merujuk perkembangan di Eropa umumnya, khususnya di Inggris, kajian hubungan internasional dipelajari secara terpisah diberbagai cabang ilmu seperti dalam bidang hukum, sejarah, dan falsafah. Bidang lain yang turut mengkaji ilmu hubungan internasional ketika itu adalah bidang ekonomi terutama yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Pendekatan-pendekatan dari berbagai bidang ilmu ini tidak cukup memuaskan untuk memahami intisari hubungan internasional yang sebenarnya.

Ada dua kenyataan yang dihadapi dalam memahami hubungan internasional. Pertama, bahwa masyarakat internasional adalah sangat berbeda dengan masyarakat nasional. Masyarakat internasional terdiri dari aktor-aktor yang memiliki kedaulatan sendiri atau berada dibawah kedaulatan yang berbeda, karena itu tidak tunduk pada satu kekuatan politik dan hukum yang terpusat. Untuk memahami interaksi diantara mereka memerlukan pemahaman yang menyeluruh baik dari aspek politik maupun sejarahnya. Kedua, ilmu hubungan internasional memerlukan pendekatan dan alat (metoda) tersendiri yang berbeda dengan pendekatan atau cara pandang kajian politik umumnya. Kedua kenyataan ini berhadapan dengan kenyataan lainnya yaitu peperangan antar bangsa-bangsa Eropa disatu sisi dan keinginan orang untuk hidup damai telah mendorong para ilmuwan ketika itu untuk mengajukan pemikiran teoritik di bidang hubungan internasional.

Pemikiran yang diajukan adalah hubungan internasional tidak boleh lagi dipandang sebagai disiplin ilmu yang terpisah, melainkan disiplin yang memiliki cara pandang atau pendekatan khusus yang mampu menterjemahkan dan memahami dimensi empiriknya secara utuh. Tatanan politik internasional pada akhir abad 19 itu juga cukup berpengaruh terhadap perkembangan kajian hubungan internasional. Inggris sebagai kekuatan dominan ketika itu juga mendominasi perkembangan pemikiran dalam bidang kajian ini. Pemikiran yang muncul juga tidak terlepas dari cerminan kepentingan Inggris dalam menghadapi tatanan dunia yang multi polar.

¹ Dyer Hugh C. & Mangasarian, Leon, (Editors), 1989, *The Study Of International Relations, The State of the Art*, St. Martin's Press in association with New York Millenium: Journal of International Studies,

Pemikiran yang diajukan berlandaskan pada hujjah (alasan) bahwa peperangan bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang, dan merupakan dosa dan musibah yang terjadi akibat ketidak sengaja. Peperangan antar bangsa terjadi adalah akibat prasangka yang muncul dalam menafsirkan keamanan yang mendorong orang mengembangkan senjata sehingga pada akhirnya manusia terjebak dalam perang. Hedley Bull salah seorang pemikir ketika itu berpendapat bahwa sistem hubungan internasional yang telah menghasilkan PD I sebenarnya dapat diubah tatanannya secara fundamental kepada keadaan yang lebih damai, dibawah pengaruh kebangkitan demokrasi, pertumbuhan pemikiran global, pembentukan Liga Bangsa Bangsa, karya-karya yang baik tentang perdamaian yang disebarkan melalui pengajaran atau pendidikan. Pemikiran ini dikenal dengan paradigma idealisme.

Berdasarkan keadaan yang dipaparkan di atas tercermin sebuah kenyataan bahwa ilmu hubungan internasional lahir sebagai sebuah disiplin ilmu sangat berbeda dengan ilmu sosial lainnya. Ilmu hubungan internasional pada saat lahirnya sangat preskriptif (memberi pedoman), normatif, dan didasarkan pada karya konseptual dari aktifitas ilmuwan yang sangat dekat keterkaitannya dengan pengambilan kebijakan. Ilmu hubungan internasional lahir dan berkembang sebagai bentuk tanggapan langsung terhadap peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di dunia dan mendefinisikan tujuan-tujuannya untuk mencegah pengulangan peristiwa-peristiwa tersebut.

Pemikiran idealis ini berkembang sejak akhir PD I hingga PD II (1920-an hingga 1930-an). Pemikiran idealis ini tampil menawarkan kepada para pengambil kebijakan di berbagai negara sebuah tatacara untuk menghindari perang. Namun kenyataannya selama dekade 1920-an dan 1930-an ketegangan akibat pacuan senjata di Eropa terus meningkat. Aliansi militer *Triple Etente* (Inggris, Perancis, Rusia) dan *Triple Alliance* (Jerman, Italia, Austria) terbentuk dan saling berhadapan. LBB tumbuh menjadi lembaga yang digunakan sebaga ajang membangun kekuatan bagi negara-negara besar Eropa sehingga lembaga yang dibentuk atas dasar cita-cita perdamaian dunia justru berubah menjadi wilayah konflik. Munculnya nazi Jerman sebagai sebuah kekuatan militer besar adalah sebuah kenyataan yang terencana untuk menjadikan negara fasis itu sebagai kekuatan dominan di Eropa. Menguatnya upaya Inggris membangun aliansi untuk mencegah ambisi Jerman adalah

kenyataan lain yang juga terencana. Persaingan kekuatan ini kemudian menampilkan kenyataan baru di Eropa, yaitu Perang Dunia II.

Pertanyaan mendasar adalah ketika diyakini manusia berkeinginan untuk damai mengapa mereka merencanakan perang? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab oleh pemikiran idealis. Sebaliknya masyarakat dunia dikejutkan dengan kenyataan perang besar yang kesekian kalinya dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Masalah utama yang melekat dalam paradigma idealis adalah pemikiran yang ditawarkan jauh dari kenyataan yang dilakukan oleh para pemimpin di negara-negara Eropa. Kenyataan di Eropa menunjukkan keinginan yang kuat dari para pemimpinnya untuk melakukan perang dalam upaya meraih dominasi kekuatan baik dibidang ekonomi maupun militer. Ambisi kekuasaan yang sangat menonjol ini kemudian membimbing bangsa-bangsa Eropa terseret kedalam kekacauan besar yang sama sekali menghancurkan keamanan dan perdamaian. E.H. Carr dalam bukunya *The Twenty Years Crisis*,² mengkritik pemikiran idealis bahwa mekanisme yang ditawarkan idealis tidak mampu mencegah perang, dan mediasi untuk meredakan konflik tidak berjalan. Pemikiran idealis dianggap sebagai mimpi kosong (utopia).

Kegagalan paradigma idealis dalam menjelaskan kenyataan hubungan internasional pada dekade 1930-an mendapat tanggapan dengan lahirnya paradigma alternatif yang dikenal sebagai paradigma realisme. Paradigma realisme ini muncul pada era pasca PD II (1940-an) dan secara umum adalah paradigma yang paling dominan, paling tidak dominasinya berlangsung hingga dekade 1980-an. Kemunculan paradigma realisme ini juga tidak terlepas dari tampilnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan pada era dan pasca PD II. Bahkan ada kecenderungan pemerintah Amerika mendorong diperkuatnya kajian hubungan internasional untuk memetakan tindakan negara adi daya ini kedepan.

Pemikiran awal yang ditawarkan oleh paradigma realisme ini ada tiga prinsip. pertama adalah negara merupakan aktor terpenting dalam hubungan internasional. Kedua, terdapat perbedaan yang tajam antara politik dalam negeri dan politik internasional. Ketiga, titik tekan perhatian kajian hubungan internasional adalah tentang kekuatan dan perdamaian. Karya yang dinilai fundamental dalam membangun paradigma realis ini adalah *Politics Among Nations* oleh Morgenthau dan *The Twenty Years Crisis* oleh E.H. Carr.

2 . Ibid, hal. 7.

Realisme adalah tradisi teoritik yang mendominasi studi hubungan internasional selama masa Perang Dingin. Pendekatan teoritik ini menggambarkan hubungan internasional sebagai suatu pergulatan memperebutkan kekuasaan diantara negara-negara yang masing-masing mengejar kepentingan nasionalnya sendiri dan umumnya pesimistik mengenai prospek upaya penghapusan konflik dan perang. Realisme mendominasi masa Perang Dingin karena gagasan ini bisa memberi penjelasan yang sederhana tetapi cukup meyakinkan mengenai perang, aliansi, imperialisme, hambatan terhadap kerjasama, dan berbagai fenomena internasional, dan karena penekanannya pada kompetisi waktu itu sesuai dengan sifat pokok persaingan AS-Uni Soviet (US).

Realisme memang bukan teori tunggal dan pemikiran realis selama masa Perang Dingin telah mengalami perubahan. Realis “klasik” seperti Hans Morgenthau dan Reihold Niebuhr yakin bahwa, seperti halnya makhluk manusia, setiap negara memiliki keinginan naluriah untuk mendominasi negara-negara lain, sehingga membuat mereka berperang. Morgenthau juga menekankan peran penting dari sistem perimbangan kekuatan multi-polar

klasik³ dan memandang sistem bipolar yang memungkinkan persaingan sengit antara AS dan US sebagai sistem yang sangat berbahaya.

Sebaliknya, teori “neo-realis” yang diajukan oleh Kenneth Waltz mengabaikan peran sifat manusia dan memusatkan perhatian pada akibat dari sistem internasional. Menurut Waltz, sistem internasional terdiri dari sejumlah negara besar, yang masing-masing berusaha untuk bertahan hidup. Karena sistem itu anarkis (yaitu tidak ada wewenang terpusat yang bisa melindungi negara dari serbuan negara lain), maka masing-masing negara harus mempertahankan hidupnya dengan usaha sendiri. Waltz berpendapat bahwa kondisi seperti ini akan mendorong negara-negara yang lebih lemah saling-bersekutu untuk mengimbangi (balance) dan melawan negara-negara yang lebih kuat, bukan malah bergabung (bandwagon) dengan negara-negara kuat itu. Bertolak-belakang dengan pendapat Morgenthau, Waltz menyatakan bahwa bipolaritas lebih stabil daripada multipolaritas.

³ Yaitu sistem yang berlaku di Eropa sesudah Perang Napoleon (pertengahan abad 19) sampai sebelum Perang Dunia I (awal abad 20).

Realisme memperoleh perbaikan dengan munculnya teori “offense-defense”, seperti yang dijabarkan oleh Robert Jervis, George Quester, dan Stephen Van Evera. Para ilmuwan ini berpendapat bahwa perang ternyata lebih mungkin terjadi ketika negara-negara dalam kondisi bisa saling-menaklukkan dengan mudah. Yaitu, ketika “offense” lebih mudah daripada “defense”. Tetapi, sebaliknya, ketika “defense” lebih mudah daripada “offense”, keamanan lebih terjamin, insentif untuk melakukan ekspansi wilayah berkurang, dan kerjasama internasional berkembang pesat. Dan kalau “defense” mendatangkan keuntungan, dan negara-negara bisa membedakan senjata ofensif dari senjata defensif, maka negara-negara bisa memperoleh sarana untuk mempertahankan diri tanpa mengancam yang lain, sehingga dengan demikian bisa mengurangi akibat dari sifat anarkis sistem internasional.

Menurut kaum realis “defensif” ini, negara-negara umumnya berusaha untuk sekedar “survive” dan negara-negara besar bisa menjamin keamanan mereka dengan membentuk aliansi-aliansi yang saling mengimbangi dan memilih postur militer yang

⁴ defensif. Karena itu, menurut Waltz dan teoritis neo-realis lain, tidak mengherankan kalau keamanan AS sangat terjamin selama masa Perang Dingin. Yang paling ditakutkan oleh ilmuwan neo-realis adalah kalau AS menyalah-gunakan posisi yang menguntungkan itu untuk menerapkan politik luar negeri yang terlalu agresif. Ini menunjukkan bahwa pada akhir masa Perang Dingin realisme tidak lagi diwarnai oleh konsepsi Morgenthau mengenai sifat manusia yang serba gelap dan pesimistik, tetapi menganut cara pandang yang lebih optimistik.

Pada awal tahun 1950-an muncul pemikiran yang mengkritik cara pandang realisme. Kritik itu bertitik pusat pada masalah kepentingan nasional dan penempatan aktor negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Bagian pertama, paradigma realis memandang kepentingan nasional adalah sebuah elemen kunci yang membimbing para pembuat kebijakan suatu negara untuk mengambil keputusan atau tindakan terhadap negara lain. Kepentingan nasional merupakan rumusan dari akumulasi kebutuhan umum

⁴ Misalnya, pengembangan sistem persenjataan nuklir dengan kemampuan membalas (retaliatory) yang meyakinkan, bukan menekankan kemampuan menyerbu.

suatu bangsa yang mencerminkan pilihan rasional dari suatu negara. Bagian kedua, paradigma realis memandang bahwa negara sebagai organisme yang hidup, berperan dan bertindak secara rasional dan tindakan-tindakannya berdasarkan kepentingan yang dirumuskan secara rasional. Kedua bagian pemikiran ini di kritisi sebagai berikut:

One of the first major attempts to develop a systematic decision making approach to the study of international politics was made in the early 1950s by Richard C. Snyder and his colleagues. The focus of international relations research should be on the actions, reactions, and interactions of states". For him, the state is specially its decision makers, and state action is the action taken by those acting in the name of the state.

Asumsi Dasar Teori HI

Idealisme

1. Semua manusia (bangsa) menginginkan perdamaian. Watak dasar manusia adalah ingin hidup dalam suasana damai, karena itu hubungan antar bangsa pada perinsipnya dikembangkan untuk menciptakan kedamaian.
2. Perang adalah dosa dan terjadi karena ketidak sengajaan. Negara-negara memiliki kedaulatan sendiri-sendiri, dan untuk memelihara kedaulatan itu diperlukan kekuatan-kekuatan terutama militer. Kemunculan militer ini telah memancing suasana tegang dan salah sangka diantara negara-negara tersebut satu sama lain, sehingga tidak terelakkan terjebak dalam perang.
3. Harus ada pemerintahan dunia yang dapat mengendalikan kekuatan-kekuatan yang menyebar dalam sistem dunia. Pemerintah dunia ini harus diberi kewenangan untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan dari berbagai negara sehingga dapat mencegah terjadinya salah sangka yang dapat memicu perlombaan senjata dan perang. Gagasan ini menghasilkan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB)

Para penganut paradigma idealisme belum secara jelas merumuskan metodologi penelitian ilmu hubungan internasional, oleh karena itu kajian dalam ilmu hubungan internasional memusatkan perhatian terhadap bidang kajian dan tingkat analisis tertentu.

Secara umum diskusi yang mereka bangun berkisar pada masalah perang dan damai dengan aktor utama negara.

Tabel 1: Matriks Idealisme

No	PENDEKATAN	PENJELASAN
1.	Prinsip Hujjah/Pemikiran	<input type="checkbox"/> Semua manusia (bangsa) menginginkan perdamaian. <input type="checkbox"/> Perang adalah dosa dan terjadi karena ketidak sengajaan. <input type="checkbox"/> Harus ada pemerintahan dunia yang dapat mengendalikan kekuatan-kekuatan yang menyebar dalam sistem dunia.
2.	Aktor	Negara
3.	Tingkat Analisis	Negara
4.	Bidang Kajian	Politik Internasional
5.	Tokoh Pemikir	Hedley Bull

Realisme

1. Negara adalah aktor utama.

- Negara mewakili unit analisis kunci dalam kajian HI. Kajian HI adalah kajian tentang hubungan antar unit-unit ini. Penganut realis yang menggunakan konsep sistem dalam pengertian interrelasi bagian-bagian biasanya merujuk pada sistem internasional.
- Organisasi internasional (PBB, MNCs, teroris dll) dapat dianggap sebagai berstatus aktor mandiri, tetapi menurut pandangan penganut realis semua aktor tersebut bukan sebagai aktor dominan, karena statusnya sangat dipengaruhi oleh negara.

2. Negara adalah aktor tunggal

- Sebuah negara menghadapi dunia luar sebagai sebuah unit yang terintegrasi. Asumsi yang umum digunakan penganut realis adalah perbedaan politik didalam sebuah negara pada akhirnya terselesaikan secara otoritatif sehingga dengan pemerintah menetapkan satu kebijakan untuk negara secara keseluruhan.

- Negara sebagai aktor tunggal menurut penganut realis merupakan aktor yang memiliki otoritas mutlak untuk mengambil kebijakan, dan status ini tidak dimiliki oleh aktor lain (aktor non negara).
3. Negara adalah aktor rasional
- Sebuah pengambilan kebijakan luar negeri yang rasional meliputi suatu penetapan tujuan, pertimbangan terhadap seluruh kemungkinan pilihan dalam arti ketersediaan kapabilitas negara.
 - Mengiringi proses rasional ini pengambil kebijakan dari kalangan pemerintahan mengevaluasi setiap alternatif, menyeleksi satu diantara yang paling maksimal kegunaannya (maksimalisasi keuntungan).
 - Meskipun demikian para penganut realis menyadari agak sulit memandang negara sebagai aktor rasional. Pengambil kebijakan dari kalangan pemerintahan bisa jadi tidak memiliki seluruh informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk memaksimalkan nilai kebijakan.
4. Keamanan nasional adalah Masalah utama
- Militer dan isu-isu yang berkaitan dengan politik mendominasi politik dunia.
 - Penganut realis memfokuskan perhatian pada konflik-konflik aktual dan potensial diantara aktor-aktor negara, menguji bagaimana stabilitas internasional dapat diupayakan atau dipertahankan, bagaimana stabilitas internasional itu hancur, dan pencegahan terhadap gangguan integritas teritorial.
 - Power adalah konsep utama. Realis menganggap keamanan militer atau isu strategis adalah termasuk politik tinggi (high politics).

Tabel 2: Matriks Realisme

No.	PENDEKATAN	PENJELASAN
1	Prinsip Hujjah/Pemikiran	<ul style="list-style-type: none"> □ Hubungan internasional adalah hubungan antar negara (bangsa) dalam bentuk pertarungan kekuatan. □ Setiap negara berusaha untuk meningkatkan powernya.

		<input type="checkbox"/> Negara adalah aktor utama. <input type="checkbox"/> Negara adalah aktor tunggal. <input type="checkbox"/> Negara adalah aktor rasional. <input type="checkbox"/> Keamanan nasional adalah masalah utama.
2	Aktor	Negara
3	Tingkat Analisis	Negara
4	Bidang Kajian	Politik Internasional, strategi keamanan, diplomasi.
5	Tokoh Pemikir	E.H. Carr, Morgenthau (1972), Kennet N Waltz, KJ. Holsti, J. Frankel, Burchill, Scott (1996), Richard Devetak, Andrew Linklater, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit, and Jacqui True, Basingstoke, Jack Donnelly (2000) dll

Behavioralisme

Richard C. Snyder adalah salah seorang generasi awal yang membangun teori pembuatan kebijakan luar negeri. Dalam hal ini Snyder menyatakan: “pusat perhatian dari penelitian hubungan internasional adalah tindakan-tindakan (*actions*), tindakan balas (*reactions*), dan tindakan timbal balik (*interactions*) dari negara-negara”.

1. Negara adalah pembuat kebijakan (decision makers). Artinya yang dimaksudkan sebagai negara dalam pandangan behavioralis adalah sekelompok orang yang bertanggungjawab membuat keputusan di negara tersebut.
2. Tindakan negara adalah tindakan yang diambil oleh pihak yang bertindak atas nama negara (pembuat kebijakan)
3. Untuk memahami perilaku negara para teoritis harus memetakan kembali dunia sesuai pandangan para pengambil kebijakan
4. Yang harus dijelaskan adalah:
 - Faktor-faktor subjektif dari titik pandang para pembuat kebijakan.

- Sumber-sumber potensial tindakan negara yang ditemukan didalam pemahaman pembuat kebijakan.

Tabel 3: Matriks Behavioralisme

No.	PENDEKATAN	PENJELASAN
1	Prinsip Hujjah/Pemikiran	Hubungan internasional mencerminkan perilaku dari para pengambil kebijakan suatu negara sehingga penelitian dalam ilmu HI harus fokus pada perilaku para pengambil kebijakan.
2	Aktor	Pengambil kebijakan
3	Tingkat Analisis	Individu/kelompok (pengambil kebijakan)
4	Bidang Kajian	Politik Luar Negeri
5	Tokoh Pemikir	Snyder, Rosnau, Lloyd Jensen, John boyd, dll

Strukturalis

1. Aktor utama dalam hubungan internasional terdiri dari negara dan aktor non negara.
 - Hubungan internasional adalah keterkaitan global yang didalamnya aktor negara dan non negara saling berinteraksi. Globalis menekankan bahwa hubungan antar aktor internasional ini membentuk struktur internasional.
2. Sangat penting untuk melihat hubungan internasional dari perspektif sejarah.
 - Penganut globalis baik dari aliran Marxis maupun non Marxis mendefinisikan karakteristik sistem internasional sebagai sistem kapitalis. Karena itu diperlukan kajian sejarah munculnya kapitalisme pada abad ke 16 di Eropa Barat, perkembangannya, perubahannya, dan perluasannya hingga saat ini sehingga terbentuknya sebuah dunia sistem kapitalis
3. Pentingnya faktor ekonomi dalam hubungan internasional.

- Strukturalis mengawali asumsinya bahwa ekonomi adalah kunci untuk memahami, kreasi, evolusi, dan fungsi dari sistem dunia saat ini.
- Berbagai aktor saling tawar-menawar, saling bersepakat, dan membangun koalisi didalam dan pada lintas batas sehingga membangun struktur global. Munculnya isu Utara-Selatan merupakan akibat dari hubungan struktural ini.

Tabel 4: Matriks Strukturalisme

No.	PENDEKATAN	PENJELASAN
1	Prinsip Hujjah/Pemikiran	<ul style="list-style-type: none"> □ Hubungan internasional adalah hubungan ekonomi antar negara-negara didunia yang secara garis besar terstruktur kedalam susunan negara industri maju, negara industri baru, dan negara berkembang atau terbelakang. □ Fokus analisis adalah interaksi antara negara dan pasar, yaitu bagaimana variable pasar (ekonomi) mempengaruhi kebijakan negara.
2	Aktor	Negara, organisasi non negara, MNCs, individu
3	Tingkat Analisis	Sistem internasional, Negara, organisasi non negara, individu
4	Bidang Kajian	Ekonomi Politik Internasional
5	Tokoh Pemikir	Robert Gilpin, Spero, Andree Gunderfrank,

Tantangan utama terhadap realisme datang dari keluarga besar teori liberal yang termasuk kedalam kelompok paradigma strukturalisme. Salah satu teori liberal mengajukan argumen bahwa interdependensi ekonomi akan mencegah negara agar tidak menggunakan daya paksa dalam berinteraksi satu-sama-lain karena perang akan merusak kemakmuran masing-masing. Teori liberal kedua, yang sering dikaitkan dengan Presiden Woodrow Wilson, memandang penyebaran demokrasi sebagai kunci utama menuju perdamaian dunia, berdasar alasan bahwa negara-negara demokratis secara inheren lebih suka damai daripada negara-negara otoriter. Teori liberal ketiga, yang lebih belakangan, mengajukan argumen bahwa institusi internasional seperti “International Energy Agency” dan “International Monetary Fund” bisa membantu mengatasi persoalan perilaku negara yang mementingkan dirinya sendiri, terutama dengan mendorong negara-negara untuk menunda

perolehan keuntungan jangka-pendek demi perolehan keuntungan yang lebih besar dalam wujud kerjasama internasional yang langgeng.

Walaupun beberapa ilmuwan liberal menganut gagasan bahwa aktor-aktor transnasional baru, terutama “multinational corporations” (MNC), sedikit-demi-sedikit mengurangi kekuasaan negara, liberalisme umumnya memandang negara sebagai pemain utama dalam urusan internasional. Semua teori liberal memuat argumen bahwa interaksi

antar-negara selama ini lebih banyak diwarnai oleh kerjasama daripada oleh konflik,⁵ tetapi masing-masing teori liberal di atas mengajukan resep yang berbeda mengenai bagaimana mengembangkan kerjasama itu.

Pluralisme

1. Aktor non negara adalah kenyataan yang penting dalam hubungan internasional.
 - Organisasi internasional sebagai contoh, dapat menjadi aktor mandiri berdasarkan haknya. Lembaga ini memiliki pengambil kebijakan, para birokrat, dan berbagai kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan.
 - MNCs, tidak bisa dianggap sebagai aktor yang marjinal, karena dia mampu menciptakan hubungan saling ketergantungan dalam perekonomian dunia.
2. Negara bukan aktor tunggal
 - Negara terdiri dari para birokrat, kelompok kepentingan, dan individu-individu yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan kebijakan
 - Negara bangsa bukanlah entitas yang terintegrasi, karena negara dan aktor non negara sering terlibat bersama dalam memformulasi aktifitas dan

⁵ Walaupun versi defensif dari realisme juga mengutamakan kerjasama, penekanan teori liberal dalam hal ini jauh lebih besar.

hubungan internasional, dan sering menimbulkan dan menerima akibat dari aktifitas internasionalnya.

3. Negara bukan aktor rasional.

- Penganut pluralis menantang realis bahwa negara bukanlah aktor rasional. Kebijakan luar negeri suatu negara adalah hasil dari perselisihan, tawar-menawar, dan kompromi diantara berbagai aktor yang berbeda.
- Proses pengambilan kebijakan luar negeri bukanlah proses rasional melainkan proses sosial. Proses pengambilan kebijakan luar negeri merupakan koalisi dan kontrakoalisi yang menyebabkan dapat mengurangi optimalisasi tujuan yang ingin dicapai.

4. Agenda Politik Internasional sangat luas.

- Penganut pluralis menolak dominasi isu militer dan keamanan dalam hubungan internasional. Hubungan internasional memiliki agenda yang sangat luas dan bervariasi.
- Sejak tigapuluh tahun terakhir isu-isu ekonomi dan sosial bahkan mengambil posisi terdepan dalam perdebatan internasional.

Tabel 5: Matriks Pluralis

No.	PENDEKATAN	PENJELASAN
1	Prinsip Hujah/Pemikiran	<input type="checkbox"/> Aktor non negara adalah kenyataan yang penting dalam hubungan internasional. <input type="checkbox"/> Pelaku-pelaku hubungan internasional non negara mampu membangun sistem internasional baru (globalisasi).
2	Aktor	Negara, organisasi non negara, MNCs, individu
3	Tingkat Analisis	Sistem internasional, Negara, organisasi non negara, individu
4	Bidang Kajian	Multi dimensi (Polin-Ekopolin)
5	Tokoh Pemikir	Robert O Keohane, Joseph S. Nye, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit

Simpulan

Perdebatan paradigma dalam kajian hubungan internasional berjalan seiring dengan perkembangan hubungan internasional sebagai disiplin ilmu. Perdebatan yang pada awalnya menyoal keberadaan dan peran ilmu hubungan internasional baik secara keilmuan maupun kehidupan nyata kemudian memusat dan menajam pada penemuan cara pandang yang menyeluruh dan meyakinkan tentang intisari dari ilmu hubungan internasional itu. Perdebatan itu secara filosofis keilmuan telah mengelompokkan para ahli ilmu hubungan internasional kedalam kelompok-kelompok pemikiran yang satu sama lain saling bertentangan bahkan saling menegasikan. Perdebatan ini telah menghasilkan paradigma kelasik dalam kajian ilmu hubungan internasional.

Paradigma awal yang berkembang dalam kajian ilmu hubungan internasional yang kemudian terlibat dalam perdebatan antar paradigma tersebut adalah idealisme, realisme, behavioralisme dan strukturalisme. Setelah itu baru muncul paradigma lain yang mengisi perdebatan lanjut didalam kajian ilmu hubungan internasional namun sifatnya cenderung

melengkapi dan memperkaya, seperti munculnya paradigma feminisme, teori normatif, dan post modernisme.

Perdebatan tahap pertama terjadi antara paradigma idealis dan Realis, yang dimulai oleh kritikan pemikir realisme terhadap gagasan mashab idealisme telah menghantarkan mashab realisme sebagai yang paling berpengaruh di zamannya. Hal ini ditunjang oleh keadaan politik dunia yang menunjukkan kecenderungan penerapan kekuatan politik (power politics) dan peran negara yang sangat dominan. Keadaan ini membenarkan asumsi-asumsi mashab realis bahwa hubungan antar negara adalah bentuk nyata dari pertarungan kekuatan. Setiap negara berinteraksi dengan negara lain dalam rangka memperbesar kekuatan politiknya dengan cara meningkatkan kapabilitas nasionalnya dan memperkecil kekuatan politik negara lain. Berdasarkan pandangan ini maka peperangan bukan sesuatu yang kebetulan melainkan telah dipersiapkan dan direncana secara matang.

Perdebatan kedua terjadi antara realis dengan behavioralis. Hasil perdebatan ini kemudian memudahkan paradigma realis dan mengangkat behavioralis pada tahap popularitasnya. Tawaran yang khas dari behavioralis adalah perilaku negara yang harus dikaji dari perilaku para pemimpinnya (para pengambil kebijakan). Namun beberapa waktu kemudian realis kembali bangkit yang kemudian dikenal dengan neo realis. Kemunculan neo realis ini untuk sementara waktu juga memudahkan popularitas behavioralis yang akhirnya muncul kembali sebagai neo behavioralis.

Perdebatan tahap ketiga adalah munculnya mazhab jalan tengah, yaitu paradigma strukturalis yang berakar pada paradigma neo marxis atau yang biasa juga dikenal dengan teori-teori kritik. Paradigma strukturalis sebenarnya menawarkan jalan tengah dengan asumsinya bahwa hubungan internasional itu bisa ditelusuri pada tingkat individu atau kelompok pengambil kebijakan (sebagaimana asumsi behavioralis) dan bisa juga ditelusuri dari tingkat negara, organisasi negara, dan organisasi non negara yang secara keseluruhan membentuk sistem internasional.

Keempat paradigma inilah yang dipandang sebagai paradigma utama dalam kajian ilmu hubungan internasional. Perkembangan hari ini telah menampilkan berbagai paradigma lain yang memperkaya kajian ilmu hubungan internasional seperti paradigma

feminisme, teori normatif, dan post modernisme sebagaimana telah dicatat di atas, namun kemunculan paradigma ini tidak mengurangi makna dan peran paradigma terdahulu bahkan sebaliknya lebih memperkaya dan menyuguhkan alternatif bagi kajian ilmu hubungan internasional.

Daftar Pustaka

- Dickens, Charles, 1989, *Hard Times*, edited by Paul Schlicke, Oxford: Oxford University Press.
- Dyer Hugh C. & Mangasarian, Leon, (Editors), 1989, *The Study Of International Relations, The State of the Art*, St. Martin's Press in association with New York Millenium: Journal of International Studies.
- Halliday, Fred, 1994, *Rethinking International Relations*, Vancouver, B.C.: University of British Columbia Press.
- Hollis, Martin and Steve Smith, 1991, *Explaining and Understanding International Relations*, Oxford: Clarendon Press.
- Morgan, Patrick M, 2003, *Deterrence Now*, Cambridge University Press, New York.
- Starr, 1997, *Agency, Structure, and International Politics: From Ontology to Empirical Inquiry*, Routledge, London.
- Viotti, Paul R, & Kauppi, Mark V, *International Relations Theory: Relism, Pluralism, Globalism*, 1990, Macmillan Publishing Company, a division of Macmillan Inc, New York.
- Weber, Cynthia, 2010, *International Relations: A Critical Introduction*, Third Edition, Routledge, New York.